

PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Joko Mariyanto

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta
e-mail: jokomariyanto21@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the significance of the influence of local taxes and levies partially or simultaneously on revenue at district / town in Central Java Province 2009 - 2013. The results were obtained conclusion: Local tax positive and significant impact on revenue, it indicates that the local tax is the most dominant component on revenue, so the local tax revenue must be continuously improved by optimization of tax collection through the intensification and extension of tax area. Levies positive and significant impact on revenue, this shows that retribution is an important component in the increase in revenue. Local taxes and levies positive and significant impact on revenue, this shows that the local government through local taxes and levies should be increased by means of closely monitoring any tax or levy to be more efficient so as the government and regional development can goes well.

Keywords: local taxes, levies, local revenue

PENDAHULUAN

Otonomi Daerah memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan. Penyelenggaraan pembangunan daerah sangat memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, ketersediaan sumber daya alam dan ketersediaan dana. Masalah utama yang terjadi dan dialami oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah adanya keterbatasan dari ketiga sumber daya yang di maksud. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk lebih pro aktif, menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada terutama sumber pendapatan daerah potensial.

Usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial tersebut dimaksudkan untuk menghimpun dan menyediakan dana sebesar-besarnya guna kebutuhan pembiayaan kegiatan pembangunan daerah. Dengan demikian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan kegiatan pembangunan di daerah sangat tergantung dari kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Proporsi Pendapatan Asli Daerah dalam seluruh penerimaan daerah masih rendah bila dibandingkan dengan penerimaan dari bantuan pemerintah pusat. Keadaan ini menyebabkan perlu dilakukan suatu upaya untuk menggali potensi keuangan daerah dalam peningkatan pendapatan daerah. Pentingnya Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pendapatan tetap, yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Pemerintah kabupaten/kota sangat disadari oleh Pemerintah daerah. Demikian pula alternatif-alternatif untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah telah pula dipertimbangkan oleh Pemerintah kota. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan yang menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah (Abdul Halim, 2004: 21-22).

Peningkatan PAD sangat menentukan sekali dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena semakin tinggi PAD disuatu daerah maka daerah tersebut akan menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pusat sehingga daerah tersebut mempunyai kemampuan untuk berotonomi. Jadi PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Biasanya penerimaan PAD untuk masing-masing daerah berbeda dengan yang lainnya, rendahnya PAD merupakan indikasi nyata di mana masih besarnya ketergantungan daerah kepada pusat terhadap pembiayaan pembangunan baik langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut disebabkan di samping rendahnya potensi PAD di daerah juga disebabkan kurang intensifnya pemungutan pajak daerah dan retribusi di daerah. Kriteria yang biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri adalah dengan peningkatan PAD berupa pajak daerah dan retribusi daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk pemerataan pembangunan daerah, meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat (Brata Kusumah, 2001: 264).

Penelitian mengenai pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Hasil penelitian-penelitian terdahulu memberikan hasil yang berbeda-beda (*research gap*).

Penelitian yang dilakukan oleh Md. Krisna Arta Anggar Kusuma1 (2013) menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian Md. Krisna Arta Anggar Kusuma1 (2013) konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriana (2014) yang menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian tersebut di atas berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dodi Nondra (2013) yang menyimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Md. Krisna Arta Anggar Kusuma1 (2013) yang meneliti tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek serta tahun penelitian. Dalam penelitian Md. Krisna Arta Anggar Kusuma (2013) sebagai objek penelitiannya adalah 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yaitu 7 Kabupaten (Singaraja, Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, dan Karangasem) dan 1 Kota Madya yakni Denpasar. Sedangkan periode penelitiannya pada tahun 2008 - 2012. Dalam penelitian ini sebagai sebagai subjeknya adalah 35 Kabupaten/Kota di Provisini Jawa Tengah yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota dengan periode penelitian tahun 2009 - 2013.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Fitriana (2014) terletak pada objek penelitian dan periode penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriana (2014) meneliti hanya satu kabupaten yaitu Kabupaten Bontang, dengan periode enelitian tahun 2002-2012, sedangkan

dalam penelitian ini sebagai sebagai subjeknya adalah 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota dengan periode penelitian tahun 2009 - 2013.

Alasan pemilihan objek penelitian pada kabupaten/kota yang ada di provinsi Jawa Tengah karena dengan mengkaji setiap kabupaten/kota akan dapat diketahui tingkat kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, di mana data PAD pada tahun 2012 untuk Kota Semarang yaitu Rp 786.563.412.000,00 sedangkan untuk Kota Salatiga pada tahun 2012 PAD yang diperoleh sebesar Rp 63.171.463.000,00 hal tersebut menunjukkan terjadi ketimpangan PAD pada masing-masing daerah.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis signifikansi pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah secara parsial maupun secara simultan terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2009 - 2013.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian survei pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2011-2013. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebanyak 35 kabupaten/kota yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Jumlah sampel yang digunakan adalah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebanyak 35 kabupaten/kota, sehingga merupakan penelitian sensus.

Definisi operasional variabel dan pengukurannya adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran rakyat kepada kas daerah berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode tahun 2009 - 2013 (dalam satuan Ribu Rupiah).

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode tahun 2009 - 2013 (dalam satuan Ribu Rupiah).

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam yang diterima pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode tahun 2009 - 2013 (dalam satuan Ribu Rupiah).

Teknik analisis data menggunakan:

1. Uji Asumsi Klasik

- a. Uji Multikolinearitas bertujuan mendeteksi adanya multikolinearitas dengan melihat nilai *tolerance* dan *Varians Inflation Factor (VIF)* yang dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS.
- b. Uji Autokorelasi dilakukan dengan uji *Run* bertujuan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak.
- c. Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji *Glejser*, yaitu dengan cara meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen.
- d. Uji Normalitas atas residual dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* melalui alat bantu komputer program SPSS.

2. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda.

HASIL PENELITIAN

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model regresi linear ganda dalam penelitian ini benar-benar menunjuk-kan hubungan yang signifikan dan representatif atau BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) dilakukan pengujian asumsi klasik dengan hasil seperti tabel 1 berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji multikolinearitas	Tolerance (0,402); (0,402); > 0,1 VIF (2,485); (2,485); < 10	Tidak ada multikolinearitas
Uji autokorelasi	p (0,168) > 0,05	Tidak ada Autokorelasi
Uji heteroskedastisitas	p (0,943); (0,828); > 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Uji normalitas	p (0,452) > 0,05	Residual normal

Sumber: Pengolahan data sekunder 2014

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu pajak daerah (X_1) dan retribusi daerah (X_2) terhadap variabel terikat yaitu pendapatan asli daerah (Y).

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	t	Sig.
(Constant)	50983431.740	6,018	0,000
Pajak Daerah (X_1)	1,156	13,988	0,000
Retribusi Daerah (X_2)	0,757	2,075	0,046
F-hitung = 304,227			0,000
R Square = 0,950			
Adjusted R Square = 0,947			

Sumber: Data penelitian diolah 2015

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan garis regresinya sebagai berikut :

$$Y = 50983431,740 + 1,156X_1 + 0,757X_2$$

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah :

- a : 50983431,740 artinya jika pajak daerah (X_1) dan retribusi daerah (X_2), sama dengan nol, maka pendapatan asli daerah (Y) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2009 - 2013 adalah sebesar Rp 50.983.431,740.
- b_1 : 1,156 artinya pengaruh variabel pajak daerah (X_1) terhadap Pendapatan asli daerah (Y) pada pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2009 - 2013 positif, artinya apabila pajak daerah meningkat sebesar satu ribu rupiah, maka dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (Y) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2009 - 2013 sebesar Rp 1,156 dengan asumsi variabel retribusi daerah (X_2) dianggap tetap.
- b_2 : 0,757 artinya pengaruh variabel retribusi daerah (X_2) terhadap pendapatan asli daerah (Y) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2009 - 2013 positif, artinya apabila retribusi daerah meningkat sebesar satu ribu rupiah, maka dapat meningkatkan

pendapatan asli daerah (Y) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2009 - 2013 sebesar Rp 0,757 dengan asumsi variabel pajak daerah (X_1) dianggap tetap.

Hasil analisis regresi linear berganda tersebut, maka variabel yang dominan pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah (Y) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2009 - 2013 adalah variabel pajak daerah (X_1), karena nilai koefisien regresinya paling besar yaitu 1,156 di antara koefisien regresi variabel bebas yang lain.

Adapun hasil analisis uji t adalah:

a. Pengujian signifikansi pengaruh pajak daerah (X_1) terhadap pendapatan asli daerah (Y) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2009 - 2013 adalah sebagai berikut: Hasil analisis diperoleh *probability value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang positif dan signifikan pajak daerah (X_1) terhadap pendapatan asli daerah (Y) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2009 - 2013.

b. Pengujian signifikansi pengaruh retribusi daerah (X_2) terhadap Pendapatan asli daerah (Y) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2009 - 2013 adalah sebagai berikut :

Hasil analisis diperoleh *probability value* sebesar $0,046 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang positif dan signifikan retribusi daerah (X_2) terhadap pendapatan asli daerah (Y) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2009 - 2013. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, maka hipotesis yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif dan signifikan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2009 - 2013”, terbukti kebenarannya.

3. Uji F

Hasil analisis diperoleh *probability value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan variabel bebas yaitu pajak daerah (X_1) dan retribusi daerah (X_2) secara simultan terhadap variabel terikat yaitu pendapatan asli daerah (Y) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2009 - 2013.

4. Koefisien Determinasi

Hasil perhitungan diperoleh nilai *Adjusted R Square* = 0,947 berarti diketahui bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas yaitu pajak daerah (X_1) dan retribusi daerah (X_2) terhadap variabel terikat yaitu pendapatan asli daerah (Y) pada kabupaten/kota di Jawa Tengah periode 2009 - 2013 sebesar 94,7% sedangkan sisanya ($100\% - 94,7\%$) = 5,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti, seperti laba badan usaha milik daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

KESIMPULAN

Hasil analisis deskriptif data yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah pada 35 kabupaten/kota di provinsi jawa tengah selama periode 2009 - 2013 menunjukkan bahwa data pajak daerah nilai terendah pada Kota Magelang sebesar Rp 10.705.574,00 nilai tertinggi pada Kota Semarang sebesar Rp 393.038.484,00 nilai rata-rata sebesar Rp 37.779.546,23 dengan nilai standar deviasi sebesar 64.956.521,77. Data retribusi daerah diperoleh nilai terendah pada Kota Magelang sebesar Rp 5.743.537,00 nilai tertinggi pada Kota Semarang sebesar Rp 85.027.166,00 nilai rata-rata sebesar Rp 27.248.338,60 dengan nilai standar deviasi sebesar 14.720.708,39. Data pendapatan asli daerah diperoleh nilai terendah pada Kota Salatiga sebesar Rp 67.017.828,00 nilai tertinggi pada Kota Semarang sebesar Rp 573.902.487,00 nilai rata-rata sebesar Rp 115.269.905,23 dengan nilai standar deviasi sebesar 86.169.229,38.

Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan komponen yang dominan terhadap pendapatan asli

daerah, sehingga penerimaan pajak daerah harus terus ditingkatkan dengan cara optimalisasi pemungutan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, hal ini menunjukkan bahwa retribusi daerah merupakan komponen yang penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi daerah, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga tertentu karena profesionalismenya. Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah harus terus ditingkatkan dengan cara melakukan pengawasan secara ketat setiap pemungutan pajak maupun retribusi agar lebih efisien agar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Ahmad Yani, 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2012, *Jawa Tengah Dalam Angka 2012*, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, Semarang.
- _____, 2013, *Jawa Tengah Dalam Angka 2013*, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, Semarang.
- _____, 2014, *Jawa Tengah Dalam Angka 2014*, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, Semarang.
- Brata Kusumah, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Djarwanto Ps dan Pangestu Subagyo, 2006, *Statistik Induktif*, BPFE, Yogyakarta.
- Dodi Nondra, 2013, Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba Badan Usaha Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan, *Open Journal Systems*, Volume 2 No. 3 Tahun 2013.
- Erly Suandy, 2000, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Edisi Pertama, Jakarta.
- Fitriana, 2014, Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bontang, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1 No. 2, Tahun 2014, SSN 2338-3651, Hal. 1875-1888.
- Imam Ghozali, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ihyaual Ulum, 2008, *Akuntansi Sektor Publik*, UMM Press, Malang.
- Mardiasmo, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi. Yogyakarta.
- Marihot P. Siahaan, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajagrafindo. Persada, Jakarta.
- Md. Krisna Arta Anggar Kusuma, 2013, Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN: 2302-8556, Volume 5.3 Tahun 2013, Hal. 574-585.
- Machfud Sidik, 2002, *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, Orasi Ilmiah Disampaikan pada Acara Wisuda XXI STIA LAN, Bandung, 10 April 2002.
- Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Stevanus J. Gomies, 2011, Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara, *Jurnal Aset*, Vol. 13 No. 2 September 2011, ISSN 1693-928X.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.